

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM HASSAN HANAFI DAN ULIL ABSHAR ABDALLA

A. Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Politik Islam Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla

Politik Islam merupakan sesuatu yang cukup problematik. Gerakan politik yang mengatas namakan Islam selalu melahirkan ketegangan dalam berbagai hal, terutama dalam diskursus negara-bangsa (*nation-state*). Beberapa kalangan berpendapat, Islam merupakan satu kesatuan yang mempunyai tipikal sosio-politik yang tidak terpisahkan, pendapat ini diperkuat dengan doktrin “*inna al-islam din wa daulah*” (sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara). Sementara kalangan Islam yang lebih cenderung memaknai sifat universalitas Islam kearah yang lebih substansialistik. Kecenderungan demikian lebih mengutamakan isi dari pada sekedar wadah politik yang dalam praktek politiknya bukan bertujuan untuk memapankan struktur politik yang ditandai dengan terbentuknya negara Islam secara formal, akan tetapi lebih cenderung kepada etika dan moralitas politik yang dialami oleh substansi ajaran-ajaran Islam.¹

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim di belahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik yang berkarakter Islamis.²

Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh tersebut. Pertama kali permulaan kesadaran politik Hanafi adalah sejak perang pembebasan palestina tahun 1948 saat masih berumur 13 tahun, atau sejak perang melawan Inggris di Terusan Suez pada 1951, atau saat mengkritik kebobrokan politik serta petisi pelengseran raja dan penghapusan penjajahan Inggris. Yang jelas, sejak terjadinya Revolusi 1952, ia merasakan inilah awal dari

¹ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak jadi Buih*, Mizan, Bandung, 2000, h. 143

² *ibid*, h. 144

sebuah era bagi kehormatan nasional dan kesatuan tanah ummat, Arab dan Islam, pembebasan tanah-tanah kaum Muslim di Hafna (Maroko), Zahran di Saudi, Haidarabad di India, dan Kashmir di Pakistan. Pergulatan dalam pemikiran dan semangat peradaban yang terus menggejolak dalam diri Hassan Hanafi merupakan permulaan munculnya kesadaran politik. Bahkan kesadaran Hanafi akan revolusi dan persatuan malah mendahului kesadaran akan perubahan sosial.³

Dalam rentang fase ini, Hassan pun juga tidak melakukan aktifitas politik praktis kepartaian atau menentanginya. Aktifitas Hanafi hanya terbatas pada mengajar dan menulis dalam kampus dan di media massa. Keadaran politik Hassan pada masa ini lebih hanya merupakan kesadaran politik filosofis murni yang berlandaskan analisis pengalaman praksis dan identifikasi pengertiannya. Dalam konteks ini Hassan berperan sebagai sosok idealis, dan dalam konteks lain berperan sebagai sosok realis. Hassan Hanafi hidup di tengah gejolak konflik dan perang di Mesir, tak heran kemudian bila pemikirannya berhaluan kiri. Sebab ia secara nyata menyaksikan berbagai macam penderitaan masyarakat lemah. Realitas sejarah yang ia saksikan itu memunculkan keresahan, sehingga akhirnya hal itu mendorong dirinya melahirkan berbagai gagasan revolusioner.⁴

Sedangkan pemikiran Ulil Abshar Abdalla dipengaruhi oleh paham liberal dan kebebasan beragama, pemikiran-pemikiran Ulil juga dipengaruhi oleh pemikiran Nurholis Majid dan Gusdur. Dan juga selama rezim Orde Baru berkuasa, masyarakat politik di Indonesia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar membina praktik politik yang bersendi pada upaya penyelesaian problem-problem kongkret yang di hadapi mereka. Sementara proses industrialisasi kian memperumit serta memperluas pelbagai dimensi soal yang muncul dalam masyarakat, wadah dan tempat untuk menyelesaikan pelbagai problem social-ekonomi sama sekali tidak memadai. Salah satu soalnya adalah karena asas yang dianut dalam penyusunan lembaga-lembaga politik itu bukan untuk membuat solusi atas kenyataan yang kongkret, lembaga kepartaian yang mestinya menjadi

³ Hassan Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Islamika, Yogyakarta, 2003, h. 55

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Iskandariyah: Dar Ibn Khaldun, tth.), Dalam M. Ridwan, "Hassan Hanafi", h. 218.

sarana untuk mencapai solusi atas problem, direkayasa begitu rupa hingga akhirnya hanya menjadi sarana untuk mengesahkan dalih negara untuk menyembunyikan problem itu.

Akibatnya adalah adanya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat untuk menyusun kekuatan-kekuatan sosial yang berguna untuk mencapai solusi atas soal-soal mereka sendiri. Lembaga-lembaga masyarakat sengaja dihancurkan, atau setidaknya dilemahkan, oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak bisa melakukan agregasi politik secara rasional dan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka. Akhirnya, masyarakat menggunakan sarana-sarana simbolis yang memang masih tersisa buat mereka, yakni agama atau etnisitas. Kerusakan-kerusakan yang terjadi akhir-akhir ini adalah salah satu contoh saja dari kebingungan masyarakat dalam menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi secara rasional, karena tak adanya lembaga untuk itu. Dengan kata lain, kerusakan itu adalah akibat dari politik yang kongkret

Lebih jauh Ulil mengatakan, yang mempengaruhinya adalah mengenai prulalisme atau kebebasan beragam yang menurut Ulil, bahwa semua agama adalah tepat berada pada jalan panjang menuju Yang Maha Benar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiusitas itu, semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama: yaitu keluarga pencipta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya.

Oleh karena itu yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antara agama, yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu.⁵

Dari pemaparan diatas jelas bahwa yang mempengaruhi pemikiran Ulil Abshar sangat dipengaruhi oleh pemikiran Liberal yang timbul karena adanya kesenjangan politik pada saat pemerintahan Orde Baru di Indonesia dan

⁵ Budhy Munawar Rahman dalam Adian Husaini, et.al, *Membedah Islam Liberal*, Bandung: PT. Sanvil Cipta Media, 2003, h. 65

Pluralisme dalam kebebasan beragama, karena menurut konsep Ulil Agama itu sama, oleh karena itu pemikiran Ulil juga dipengaruhi oleh pemikiran Nurkholis Majid dan Abdurrahman Wahid, tentang Pluralime, dan kebebasan beragama.

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Politik Islam Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla

Dari berbagai kesimpulan kedua tokoh tersebut dapat diambil persamaan dan perbedaan keduanya dalam hal pemikiran politik Islam. Dalam persamaannya kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran pandangan politik yang mengarah kepada politik Islam kiri, yang mana menurut Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla dalam berpolitik menginginkan adanya berproses berpolitik dalam sebuah negara, tidak lepas dari pengaruh pemikiran Barat. Keduanya juga menyadari bahwa seorang ilmuwan harus mempunyai tanggung jawab politik terhadap bangsanya.

Pada awal tulisan telah diuraikan secara panjang lebar mengenai sejarah hidup Hassan Hanafi, termasuk juga tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar terhadap pembentukan pemikiran Hassan Hanafi. Semua itu merupakan ikhtiar untuk menganalisa pemikiran Hassan Hanafi secara lebih cermat. Karena menurut Ibnu Khaldun, kondisi sosiokultural seseorang punya pengaruh yang besar terhadap pemikirannya. Artinya, penting bagi siapapun yang hendak meneliti pemikiran seseorang mengenal dan memahami pemikiran tokoh, ia mestinya juga harus paham sejarah tokoh tersebut.

Hassan Hanafi merupakan intelektual Islam yang punya komitmen dan kecintaan yang besar terhadap Islam, namun ia tetap secara konsisten bisa menempatkan diri secara proporsional dalam melihat Islam. Kiri Islam merupakan salah satu proyek pemikiran Hassan Hanafi, yang lahir karena keresahan yang dihadapinya dalam melihat realitas sosial di lingkungannya. Berbagai bentuk penindasan, kemiskinan, dan penderitaan yang dialami rakyat menjadi bumbu munculnya pemikiran Kiri Islam. Hanafi menghendaki agama sebagai ruh kehidupan mampu mendorong lahirnya kehidupan yang bermartabat dengan semangat pembebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Kiri Islam tak lahir di ruang

hampa. Ia merupakan proyeksi tentang tatanan kehidupan ideal yang dibayangkan Hassan Hanafi.

Pemikiran politik Ulil Abshar Abdalla juga mempunyai pandangan tentang politik Islam kiri. Pemikiran Ulil Abshar sangat dipengaruhi oleh pemikiran Liberal dan Pluralisme dan kebebasan beragama, karena menurut konsep Ulil Agama itu sama, oleh karena itu pemikiran Ulil juga dipengaruhi oleh pemikiran Nurkholis Majid dan Abdurrahman Wahid, tentang Pluralisme, dan kebebasan beragama. Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

Mereka berdua sama-sama berpendapat bahwa agama dan politik harus dipisahkan, menurut Hassan Hanafi agama dan politik harus dipisahkan agar umat Islam tidak hanya bertendesi atau berorientasi kepada tujuan ukhrowi, dan kekuasaan. Sedangkan Islam Liberal Ulil yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik.

Sedangkan dalam perbedaannya dapat dilihat dari latar belakang pemikirannya dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan antara kedua tokoh tersebut antara lain:

Latar belakang munculnya pemikiran politik Ulil adalah adanya kesenjangan politik pada masa Orde Baru yang mengalami krisis pluralisme, dalam hal ini Ulil memberikan kritik terhadap fenomena tersebut. Dan ia memberikan konsep pemikiran baru untuk mengatasi problem tersebut dengan konsep politik liberal.

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau

kepercayaan. Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik.

Sedangkan latar belakang munculnya pemikiran politik Hassan Hanafi adalah adanya kesenjangan sosial yang terjadi di Mesir. Ia hidup di tengah gejolak konflik dan perang di Mesir, tak heran kemudian bila pemikirannya berhaluan kiri. Sebab ia secara nyata menyaksikan berbagai macam penderitaan masyarakat lemah. Realitas sejarah yang ia saksikan itu memunculkan keresahan, sehingga akhirnya hal itu mendorong dirinya melahirkan berbagai gagasan revolusioner.

Hanafi menyebut bahwa Kiri Islam berangkat dari keresahan perbedaan “yang satu” dalam umat Islam, yakni antara miskin dan kaya, kuat dan lemah, antara penindas dan yang ditindas, antara yang memiliki semua hal dan yang tidak memiliki apa-apa, dan antara orang yang eksis dan yang tidak eksis. Hassan Hanafi sependapat dengan Al-Afghani, bahwa dalam umat Islam ada dua: penguasa dan yang dikuasai, pemimpin dan rakyat, tinggi dan rendah. Tugas kita bersama sebagai umat Islam adalah menghilangkan sisi keduanya dan mewujudkan sisi pertamanya. Hanafi menghendaki persamaan derajat umat Islam, tidak ada lagi orang mendirita, tak ada penindasan, tak ada orang miskin, semua orang mesti sama. Biarkan yang membedakan ketakwaan dan amal shalehnya.

Pemerintahan yang baik dalam sebuah negara menurut Hassan Hanafi adalah adanya keinginan umat Islam untuk lebih progresif mengikuti perkembangan masyarakat, masyarakat jangan cenderung pasrah terhadap realitas kehidupan. Negara yang benar adalah ketika adanya pemerataan kesejahteraan rakyat, bukan hanya melibatkan rakyat dalam proses produksi tanpa adanya tingkat kesejahteraan rakyat. Hanafi mengajak umat Islam mengkritisi hegemoni kultural, politik dan ekonomi Barat, yang dikemas dibalik kaidah orientalisme. Selanjutnya negara yang sesuai dalam hukum dan syariat Islam, dan proses ke pemerintahan yang tidak hanya menjajikan keadilan social, namun mengkibiri

kebebasan rakyat dan tidak diikuti oleh pengembangan khazanah kerakyatan, hal yang membuat sulit untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional. Melalui gagasan tersebut pemikiran Kiri Hanafi hadir untuk memberikan pencerahan dan penyadaran kepada umat islam di seluruh dunia.

Selanjutnya perbedaan yang muncul yang mempengaruhi pemikiran Hassan Hanafi dan Ulil Abshar Abdalla, tentu lingkungan pribadi mereka berdua, yaitu Hassan Hanafi merupakan keturunan dari sebuah keluarga yang berlatar belakang musisi, sedangkan Ulil sudah jelas-jelas dia merupakan keluarga ulama yang berasal dari keluarga santri di daerah Pati.